

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan judul:

**Kerjasama *Sister Province* Antara Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia Dengan Pemerintah Victoria, Australia (2015-2017)**



Zh Amalva Renggani

20140510073

Yang menyetujui

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Ali Mukti', written in a cursive style.

Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.

Dosen Pembimbing

Kerjasama *Sister Province* Antara Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Dengan Pemerintah Victoria, Australia

Zh Amalya Renggani

Abstrak

D.I. Yogyakarta merupakan provinsi yang aktif menerima tawaran kerjasama dalam bentuk *sister province*, salah satunya yaitu tawaran kerjasama dari Negara bagian Victoria. Permasalahan awal muncul ketika DIY menghadapi penolakan dalam usulan bidang kerjasama perekonomian, walaupun begitu DIY tetap menerima dan melanjutkan kerjasama hingga adanya nota kesepahaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya kerjasama *sister province* antara DIY – Victoria. Dugaan awal dari kasus ini adalah adanya kesamaan karakteristik antara DIY dan Victoria serta adanya kalkulasi keuntungan yang dapat diambil dan mengesampingkan kerugian.

Abstract

D.I. Yogyakarta is a province that actively accepted cooperation offer in the form of sister province, one of which is bid of cooperation from State Victoria. Initial problems arise when DIY faces rejection in the proposed field of economic cooperation, even so DIY still accept and continue cooperation until the memorandum of understanding. This study aims to determine the reasons for the sister province cooperation between DIY - Victoria. The initial suspicion of the case is that there is a characteristic similarity between DIY and Victoria as well as the calculation of the profit that can be taken and the exclusion of losses.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini semakin memudahkan terjalinnya kerjasama bahkan antara suatu kota di dalam negeri dengan kota di luar negeri. Salah satu akibat dari adanya globalisasi adalah kabur/hilangnya batas-batas Negara (*borderless*), akibat dari adanya globalisasi tersebut tentunya dapat menjadi peluang bagi mereka-mereka yang menganggap globalisasi sebagai sesuatu yang positif atau yang belakangan sering disebut dengan kaum *hyper-globalist*.

Pada awalnya kerjasama luar negeri hanya difokuskan pada pemerintahan pusat, kemudian diikuti dengan kota-kota di dalam negeri yang mulai berani untuk menjalin kerjasama dengan kota-kota di luar negeri, kerjasama tersebut kemudian dikenal dengan *sister city* atau *sister province*. Kerjasama *sister City/sister province* terbentuk karena adanya kesamaan antar kota/provinsi satu dengan kota/provinsi lainnya dalam karakteristik, budaya, serta aspek-aspek lainnya.

Hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata yang positif dari adanya globalisasi. Telah banyak kota-kota mandiri yang menjalin kerjasama dengan kota-kota di luar negeri salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D.I. Yogyakarta yang menjalin kerja sama luar negeri dengan pihak asing telah dirintis jauh sebelum era otonom daerah karena adanya kedekatan antara pemimpin-pemimpin di D.I. Yogyakarta dengan

pemimpin-pemimpin asing. Beberapa kedekatan yang akhirnya menjadi pencetus kerjasama luar negeri adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan Provinsi Ismailiya Republik Arab Mesir serta kerjasama antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan prefektur Kyoto karena adanya kedekatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Gubernur DIY) dengan Gubernur Prefektur Kyoto Jepang yang dulunya pernah melakukan tugas militer di Yogyakarta. Awal Mula kerjasama Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta adalah kerjasama dengan prefektur Kyoto pada tanggal 16 Juli 1985 dengan perpanjangan kerjasama pada 20 Oktober 2010 (Setda Provinsi DIY, 2006). Kerjasama tersebut dilandasi dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang memperkuat kerjasama keduanya sebagai kerjasama Internasional.

Dengan banyaknya sumber daya yang terdapat di D.I. Yogyakarta, D.I. Yogyakarta tentunya banyak sekali meneriwa tawaran kerjasama dari kota-kota luar Negeri. Namun, dalam prosesnya untuk mewujudkan kerjasama tersebut banyak pertimbangan sehingga D.I. Yogyakarta dapat memilih satu kota yang dijakini dapat memberikan keuntungan lebih besar daripada jika D.I. Yogyakarta menjalin kerjasama dengan kota lainnya. Terdapat beberapa kerjasama yang baru dijalani oleh pemerintah D.I. Yogyakarta yaitu kerjasama dengan Yamanashi Jepang, Shanghai Republik Rakyat Tiongkok, dan kerjasama pemerintah D.I. Yogyakarta dengan pemerintah Victoria yang termasuk salah satu Negara bagian Australia.

Victoria merupakan sebuah Negara bagian yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta perekonomian di Negara inipun merupakan perekonomian terbesar kedua di Australia setelah New South Wales. GDP Victoria yaitu mencapai 23% dari GDP Australia, ekonomi Victoria bahkan lebih besar dari gabungan antara ekonomi Singapura dan New Zealand, pendapatan ekonomi Australia memiliki spesialisasi pada sektor bernilai dan berkualitas tinggi seperti pendidikan, makanan, dan pariwisata, sekitar setengah dari pendapatan ekonomi tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor jasa yang berbasis keahlian seperti pendidikan, keuangan dan asuransi, serta properti dan pariwisata. (BKPM, 2017)

Majunya perekonomian Victoria tentu merupakan sebuah peluang untuk menjalin kerjasama. Pasti ada banyak sekali kota-kota ataupun provinsi-provinsi yang bersedia untuk bekerja sama. Tawaran kerjasama pun akhirnya diterima oleh pemerintah D.I. Yogyakarta, sama seperti kota-kota lainnya, D.I. Yogyakarta sudah pastilah mengharapkan kerjasama di bidang perekonomian. Namun, Victoria malah justru memberikan batasan dalam bidang kerjasama. Meskipun Victoria yang menawarkan kerjasama kepada D.I. Yogyakarta tetapi Victoria menolak keinginan D.I. Yogyakarta untuk bekerjasama di bidang perekonomian. Namun, setelah adanya batasan kerjasama tersebut, kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Victoria tetap terlaksana.

Berikut akan dibahas mengenai gambaran umum provinsi D.I. Yogyakarta, landasar kerjasama *sister city* maupun *sister province* di Indonesia, kerjasama *sister province* yang telah dijalani oleh D.I. Yogyakarta, gambaran umum kota Victoria, mengenai kerjasama *sister*

province itu sendiri yang memuat inisiasi awal pembentukan kerjasama dan hambatan dalam pembentukan kerjasama, serta alasan mengapa D.I. Yogyakarta tetap melanjutkan kerjasama dengan Victoria.

B. Pembahasan

B. 1 Gambaran Umum D.I. Yogyakarta, Landasan Peraturan *Sister Province/City*, Kerjasama *Sister Province D.I. Yogyakarta*

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pemecahan dari kerajaan Mataram melalui perjanjian Giyanti. Melalui perjanjian tersebut kerajaan Mataram dipecah menjadi kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang disebut juga dengan Kasultanan Ngayogyakarta dan kasunanan Surakarta. Berawal dari pemecahan tersebut kemudian muncul sebuah sistem pemerintahan yang teratur dan berkembang hingga kemudian menjadi salah satu bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki status sebagai Daerah Istimewa atas dasar sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kasultanan dan kasunanan Ngayogyakarta memiliki pemerintahan sendiri. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal kedua kepala daerah kasultanan Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan kepada daerah Kadipaten Pakualam Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu adalah Ir. Soekarno bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta dan Daerah Kadipaten Pakualam menjadi bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dan menjadi satu kesatuan yang kemudian dinyatakan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perekonomian D.I. Yogyakarta bersumber dari beberapa sektor, diantaranya adalah sektor industri, pendidikan, jasa, pariwisata, kehutanan dan lain sebagainya. Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian D.I. Yogyakarta tahun 2015 tumbuh sebesar 4,94 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,18 persen (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, 2016). Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 2016 pertumbuhan perekonomian D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan dan segala sektor berjalan semakin membaik. Hal tersebut didorong dengan adanya investasi/penanaman modal lokal maupun asing yang masuk ke Indonesia khususnya D.I. Yogyakarta. Selain itu, hal yang juga mendukung pertumbuhan perekonomian adalah membaiknya kinerja perdagangan luar negeri. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor impor luar negeri merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan I 2016 serta dari lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan menjadi penopang utama pertumbuhan DIY pada Triwulan I 2016, seiring dengan kembali bergairahnya kegiatan MICE dan kegiatan liburan mengisi *long weekend* (Tim Ekonomi dan Keuangan BI, 2016).

Adapun Landasan Peraturan Mengenai *Sister Province/City* di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Segala peraturan dan tata cara kerjasama dimuat dalam Undang-Undang dan peraturan menteri tersebut.

D.I. Yogyakarta merupakan salah satu dari banyak daerah yang aktif menjalin kerjasama luar negeri, yaitu kerjasama *sister city/province*. Pemerintah Indonesia sendiri memberi kesempatan besar kepada pihak luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tanpa harus melewati pemerintah pusat. Hal ini tentunya memberikan keuntungan pada kedua pihak karna lebih mudah dalam proses pembentukan kerjasama yang akan dijalin. Beberapa kerjasama yang dijalin oleh pemerintah D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto Prefektur, Jepang

Kerjasama *sister province* antara pemerintah D.I. Yogyakarta dengan prefektur Kyoto merupakan satu-satunya kerjasama yang unik dan istimewa. Dikatakan istimewa karena kerjasama ini merupakan kerjasama yang pertama kali dijalin oleh D.I. Yogyakarta dengan pihak luar negeri. Inisiasi awal kerjasama keduanya muncul dikarenakan adanya kedekatan antara kedua pimpinan daerah. Adanya kedekatan antara gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Yukio Hayasida yang merupakan gubernur Kyoto. Gubernur Kyoto tersebut berada di Indonesia pada saat perang dunia kedua dan bekerja di D.I. Yogyakarta sehingga kedekatan dengan gubernur D.I. Yogyakarta terjalin dan hingga akhirnya muncul inisiasi kerjasama *sister province*.

Awal Mula kerjasama Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta adalah kerjasama dengan prefektur Kyoto pada tanggal 16 Juli 1985 dengan perpanjangan kerjasama pada 20 Oktober 2010 (Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006). Kerja sama Pemerintah Propinsi DIY dengan Kyoto Prefektur Jepang secara resmi terjalin pada tanggal 16 Juli 1985 Kerjasama Luar Negeri Provinsi D.I. Yogyakarta dengan ditandatanganinya persetujuan untuk pembentukan Hubungan Kerja sama Persahabatan antara kedua pemerintahan propinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Kyoto Prefektur, Jepang (Mukti, 2013).

- 2) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-Do, Korea Selatan

Inisiasi awal munculnya kerjasama keduanya yaitu ketika D.I. Yogyakarta menerima tawaran kerjasama dari gubernur provinsi Gyeongsangbuk dilanjutkan dengan tawaran kunjungan ke Gyeongsangbuk yang ditujukan kepada gubernur D.I. Yogyakarta. D.I.

Yogyakarta menyambut positif tawaran kerjasama tersebut, namun menunda undangan kunjungan ke provinsi Gyeongsangbuk.

Kerja sama antara Provinsi DIY dan Propinsi Gyeongsangbuk diresmikan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* oleh Gubernur DIY dan Gubernur Gyeongsangbuk pada tanggal 24 Februari 2005 di Kraton Yogyakarta. Program-program kerja sama yang disepakati dalam MoU adalah bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri serta investasi. (Mukti, 2013)

- 3) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Ismailia, Republik Arab Mesir

Program kerja sama Provinsi DIY-Propinsi Ismailia berpedoman pada MoU yang meliputi lima bidang, yaitu bidang perdagangan, pariwisata, teknologi, industri, pendidikan, dan kebudayaan (Mukti, 2013). Dengan adanya program yang sudah tersusun tidak menandakan kerjasama tersebut akan berjalan sesuai dengan yang sudah dirancang. Walaupun program-program telah tersusun, namun hanya satu program yang dapat terselenggara yaitu pengiriman misi budaya provinsi D.I. Yogyakarta ke Ismailiya.

Dengan adanya kendala-kedala beberapa kerjasama yang mengalami permasalahan akhirnya diadakan kegiatan Seminar Evaluasi Program Kerjasama Luar Negeri dengan pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta, yang mana kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghidupkan kembali kerjasama yang mengalami kendala.

- 4) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Negara Bagian California, USA

Kerja sama Provinsi Kembar antara Negara Bagian California dan Propinsi DIY, dimulai sejak ditandatanganinya MoU Kerja sama Pada tanggal 25 Agustus 1997 di Scramento, California. Pada penandatanganan Kerjasama ini Pihak Propinsi DIY diwakili oleh Sri Paku Alam VIII, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DIY, dan Negara bagian California diwakili oleh Bill Lockyer, Presiden Pro Tempore Senat Negara Bagian California. Dalam acara yang sama ditandatangani pula MoU Kerja sama antar KADIN kedua belah pihak. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk mengembangkan pembangunan Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Negara Bagian California di bidang-bidang ekonomi/perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, lingkungan hidup, investasi serta bidang-bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. (Mukti, 2013)

- 5) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria

Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria diawali pada tahun 1989, kerjasama antara D.I. Yogyakarta dengan Tyrol Republik Austria diawali dengan pemberian beasiswa *post graduated* program bagi Universitas Gajah Mada serta pendirian Laboratorium Kimia Komputer yang disponsori oleh Prof. B. M. Rode. Dalam hal menangani keperluan tersebut, Prof. B. M.

Rode berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali (Mukti, 2013). Kerjasama D.I. Yogyakarta dengan provinsi Tyrol hampir sama dengan kerjasama antara D.I. Yogyakarta dengan Kyoto, kesamaan antar keduanya terletak pada adanya kedekatan antara pendiri laboratorium yang didirikan di UGM dengan petinggi dari jurusan kimia UGM itu sendiri. Dari adanya kedekatan yang terjalin tersebut maka semakin memunculkan peluang untuk bekerjasama walaupun sebelum itu sudah terbentuk kerjasama antara UGM dengan provinsi Tyrol. Kerjasama yang ingin dibangun dalam hal ini adalah kerjasama sister province antara D.I. Yogyakarta dengan Tyrol. Kemudian, wacana tersebut dilanjutkan pada pembahasan antar pemimpin masing-masing provinsi yang menghasilkan sebuah rekomendasi dan upaya untuk pembentukan kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Tyrol Australia.

- 6) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Chungcheongnam-Do, Korea Selatan

LoI antara DIY-Chungcheongnam ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2004 oleh Bayudono (Kepala BAPEDA Provinsi DIY) dan Song Suk-Doo (Dirjen Biro Ekonomi dan Perdagangan Provinsi Chungcheongnam). Selanjutnya Gubernur Chungcheongnam bersama delegasi yang berjumlah 12 orang berkunjung ke DIY dalam rangka penandatanganan MoU kerja sama *sister province*. MoU *sister province* antara DIY-Chungcheongnam ditandatangani pada tanggal 13 September 2004 oleh Hamengku Buwono X (Gubernur DIY) dan Sim Dae-Pyung (Gubernur Chungcheongnam Korea). Namun, Sejauh ini, kerja sama dengan Provinsi Chungcheongnam belum ada realisasinya sebab ada kebijakan dari Pemerintah Korea Selatan bahwa bentuk kerja sama antara kedua provinsi ini harus diubah bentuknya sehingga bukan dalam bentuk *sister province*, mengingat bentuk ini telah digunakan sebagai ikatan kerja sama antara Provinsi DIY dengan Gyeongsangbuk-Do sebelumnya. Agenda perubahan bentuk kerja sama itu sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya. (Mukti, 2013)

- 7) Kerjasama Sister Province Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gangwon, Korea Selatan

Kerja sama Provinsi DIY dengan provinsi Gangwon, Korea Selatan disetujui Rencana kerja samannya, termasuk draft *Memorandum of Understanding* antara kedua pihak, oleh DPRD DIY pada tanggal 30 Mei 2009. Gubernur DIY kemudian menindaklanjuti persetujuan rencana kerja sama tersebut dengan melakukan pertemuan dengan pihak Gangwon untuk melakukan penandatanganan MoU pada bulan berikutnya dengan nama kerja samanya adalah '*Memorandum of Understanding Friendly Ties*'. Pembahasan persetujuan rencana kerja sama dengan Gangwon ini agak unik karena terjadi pada saat perubahan aturan atau lebih tepatnya adanya peraturan baru dari Depdagri yang kurang sinkron dengan aturan dari Deplu sebelumnya. Sesuai dengan pembahasan pada saat rapat Pansus BA 8 tahun 2009 bahwa fokus kerjasama *sister province* ini ada di 6 bidang, yaitu Pariwisata, Pendidikan, Pertanian, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan

(riset) dan Teknologi, serta Olahraga (Mukti, 2013). Kerja sama dengan Gangwon ini termasuk kerja sama yang sempat mandek dan baru ada aktivitas pada tahun 2011, yakni dengan keikutsertaan dalam “2011 Gangwon Provincial Program For Local Government Officials of Sisterhood Governments”; dalam kerangka kerja sama persahabatan antara Provinsi DIY dengan Gangwon, Korea Selatan. (Laporan Pertanggung jawaban Gubernur DIY, 2011)

B.2 Gambaran Umum Negara Bagian Vitoria dan Kerjasama Sister Province D.I. Yogyakarta – Victoria

Victoria merupakan sebuah Negara bagian Australia dengan luas terkecil namun merupakan Negara terpadat kedua di Australia setelah New South Wales. Pada awalnya Victoria merupakan sebuah kota yang berada di New South Wales, namun sejak tahun 1851 Victoria resmi memisahkan diri dari Negara bagian New South Wales dan menjadi sebuah koloni yang merdeka. Hal tersebut dikarenakan adanya perburuan emas secara besar-besaran yang terjadi di dunia sejak ditemukannya tambang-tambang emas di Ballarat dan di Bendigo. Pada tahun 1901 Victoria kembali bergabung menjadi salah satu Negara bagian Australia seperti Negara bagian lainnya. Sebuah kota di Victoria yaitu Melbourne, dulunya pernah menajadi ibukota Australia selama 26 tahun sejak 1901 – 1927 sebelum akhirnya kini Canberra yang menjadi ibukota Australia setelah selesai dibangun.

Secara umum, kondisi perekonomian Victoria yang kurang kondusif, sebagai akibat kebakaran hutan, kekeringan, ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya daya serap pasar internasional, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anggaran negara bagian tersebut tahun 2003-2004. Namun demikian, anggaran belanja Victoria masih memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi karena kondisi finansial yang relatif stabil. (Kementrian Luar Negeri)

GDP Victoria yaitu mencapai 23% dari GDP Australia, ekonomi Victoria bahkan lebih besar dari gabungan antara ekonomi Singapura dan New Zealand, pendapatan ekonomi Australia memiliki spesialisasi pada sektor bernilai dan berkualitas tinggi seperti pendidikan, makanan, dan pariwisata, sekitar setengah dari pendapatan ekonomi tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor jasa yang berbasis keahlian seperti pendidikan, keuangan dan asuransi, serta properti dan pariwisata. (BKPM, 2017)

Victoria memiliki bentuk pemerintahan parlementer berdasarkan sistem *Westminster* yang berkembang di wilayah Britania Raya. Dalam pemerintahan Victoria, kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen yang di dalamnya terdiri dari Gubernur yang merupakan wakil dari Ratu, eksekutif yaitu pemerintah itu sendiri, dan legislatif yang terdiri dari dua dewan atau majelis dewan legislatif dan majelis legislatif. Dewan Legislatif kadang-kadang disebut sebagai majelis tinggi dan Majelis Legislatif kadang-kadang disebut majelis rendah (Parliament of Victoria, 2010). Perdana Menteri saat ini adalah Daniel Andrews MP. *Premier* adalah pemimpin partai atau koalisi yang mendapat dukungan mayoritas anggota di Dewan Legislatif. *Premier* adalah menteri utama pemerintah

dan mengepalai Departemen Premier dan Kabinet. (Parliament of Victoria, 2017)

Inisiasi awal kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Victoria muncul pada bulan Juni 2013 saat *premier* Victoria, Mr. Denis Napthine beserta delegasi 450 Pengusaha UKM Victoria berkunjung ke Yogyakarta dalam rangka peninjauan peluang bisnis. *Premier* ditemui oleh Gubernur D.I. Yogyakarta, dan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah wacana pembentukan kerja sama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Victoria (BKPM, 2017). Tawaran tersebut kemudian dilihat dan ditimbang potensinya, dan dilihat bahwa Victoria berpotensi dan dianggap akan bisa memberikan keuntungan, selain itu karakteristik keduanya juga hampir sama maka sangat mungkin untuk terjalin kerjasama. Rencana tujuan kerjasama keduanya berjalan pada tanggal 30 September 2015 dengan ditanda tangannya *Letter of Intens* (LoI). Setelah melalui beberapa kunjungan dan pertimbangan, berlanjutlah hubungan antara kedua kota dengan ditandatanganinya MoU pada tanggal 3 Mei 2017 oleh pimpinan kedua kota tersebut sebagai tanda dimulainya kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Victoria.

Dalam pembentukan kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta – Victoria tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dihadapinya. Dalam kasus perwujudan kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta – Victoria ini hambatan yang dihadapi antara lain, yaitu (Albana, 2018) :

- 1) Keterbatasan anggaran di masing-masing Negara
- 2) Keterbatasan jarak dan waktu menyebabkan kesulitan dalam menentukan waktu penandatanganan MoU karena mencari momentum yang tepat sangatlah sulit. Sehingga, terdapat beberapa program kerjasama yang sudah dilaksanakan sebelum MoU karena memang sudah terjalin hubungan masyarakat yang kuat dan bagus antara masyarakat D.I. Yogyakarta dengan Victoria.
- 3) Kurangnya koordinasi antara instansi yang seharusnya melaksanakan program kerjasama sesuai dengan bidangnya. Misalnya, kerjasama dibidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan bidang industri kreatif yang mana seharusnya dilaksanakan sesuai dengan dinas/instansi bidangnya masing-masing. Program kerjasama bidang pendidikan seharusnya turut juga dilaksanakan oleh dinas pendidikan begitupun dengan bidang kebudayaan yang seharusnya dilaksanakan oleh dinas kebudayaan. Namun, kebanyakan dinas pendidikan dan dinas kebudayaan merasa bahwa hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) dan bukan tugas serta tanggung jawab dinas pendidikan dan dinas kebudayaan. Tidak ada sinkronisasi atau bahkan mungkin tidak menyadari bahwa setelah ditandatanganinya MoU maka kemudian program-program kerjasama yang telah tercantum dalam MoU tersebut juga menjadi tugas dan tanggungjawab semua instansi yang berhubungan bukan saja tugas dan tanggung jawab Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM).

B.3 Alasan D.I. Yogyakarta Menjalin Kerjasama *Sister Province* dengan Negara Bagian Victoria, Australia

Persetujuan adanya kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Victoria tentunya didorong oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008. D.I. Yogyakarta dan Victoria memiliki kesamaan administratif. Walaupun secara pemerintahan D.I. Yogyakarta dan Victoria memiliki status pemerintahan yang berbeda yaitu D.I. Yogyakarta berstatus sebagai sebuah provinsi sedangkan Victoria merupakan sebuah Negara bagian, namun keduanya sama-sama dipimpin oleh seorang gubernur. Selain itu, sejarah administratif keduanya sama-sama merupakan mantan ibu kota Negara, yaitu Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia sebelum dipindahkan lagi ke Jakarta, dan Victoria juga pernah menjadi ibu kota Australia sebelum dipindahkan ke Canberra setelah selesai dibangun. Selain kesamaan status administratif tersebut, D.I. Yogyakarta menjalin kerjasama *sister province* dengan Victoria dikarenakan adanya kesamaan karakteristik. Adapun beberapa kesamaan karakteristik tersebut antara lain adalah:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Victoria Merupakan Daerah yang Kaya Seni dan Budaya.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Victoria Merupakan Daerah Pariwisata.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Victoria Merupakan Daerah Pendidikan
4. Yogyakarta dan Victoria Merupakan Daerah yang Tepat Untuk Memulai Bisnis

Kesamaan karakteristik antara D.I. Yogyakarta dengan Victoria sangat diperlukan dalam kerjasama *sister province*, adanya kesamaan karakteristik tersebut dibutuhkan karena hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kesamaan karakteristik antara D.I. Yogyakarta dan Victoria juga dapat menjadikan kerjasama yang terjalin antar keduanya menjadi sebuah kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain keuntungan-keuntungan tersebut, adanya kesamaan karakteristik juga diharapkan dapat membuat hubungan kerjasama berlangsung dalam waktu lebih lama dan dapat bertahan dengan terus melakukan program-program yang bermanfaat bagi keduanya, dapat bertahan lebih lama juga karena bidang-bidang yang dikerjasamakan tersebut memiliki komparasi dan dapat dikerjakan secara bersama.

Namun, adanya kesamaan karakteristik tersebut bukan berarti segala yang dimiliki D.I. Yogyakarta dari segi seni dan budaya, pendidikan, pariwisata adalah sama dengan Victoria, segala yang dimiliki keduanya mempunyai perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Seperti contoh, budaya yang dimiliki D.I. Yogyakarta dalam bidang musik dan tari, berbeda dengan budaya yang dimiliki Victoria walaupun dalam hal ini Victoria juga unggul dalam bidnag tersebut. Adanya perbedaan dalam persamaan tersebut menjadikan kerjasama yang terjalin dapat saling melengkapi. Dengan adanya perbedaan tersebut juga dapat menjadi ajang

pembelajaran pada masing-masing pihak. Disinilah muncul upaya untuk saling melengkapi yang juga termasuk salah satu syarat pembentukan kerjasama *sister city* maupun *sister province*.

Bidang-bidang yang dikerjasamakan dalam kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dan Victoria juga memuat program kerja-program kerja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, contohnya seperti kolaborasi musisi-musisi yang ada di D.I. Yogyakarta dengan *Melbourne Symphony Orchestra*. Masyarakat mendapat pengalaman berharga tentunya dan hal ini dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah itu sendiri maupun antar masyarakat yang terlibat langsung dalam program kerjasama tersebut. Pada kenyataannya, antar masyarakat D.I. Yogyakarta dengan Victoria memang sudah ada hubungan yang terjalin cukup baik sebelum adanya hubungan antar pemerintah, sudah terjalin *sister school*, sudah banyak seniman Indonesia yang tampil di Victoria dan sebaliknya, banyak juga universitas yang sudah saling bekerjasama contohnya *Monash University* dengan Universitas Gadjah Mada, yang dilakukan pemerintah D.I. Yogyakarta dan Victoria merupakan langkah untuk memperkuat hubungan yang sudah terjalin baik tersebut dengan tujuan meningkatkan hubungan antar masyarakat (Albana, 2018).

Gubernur D.I. Yogyakarta melalui salah satu *staff* sub. Bidang kerjasama luar negeri BKPM D.I. Yogyakarta (Albana, 2018) mengatakan bahwa saat ini pusat pertumbuhan sudah tidak lagi berada di Atlantik namun sudah bergesek ke Pasifik, agar Australia bisa mengakses pasar Asia/Pasifik Australia harus melewati Indonesia. Hal ini menjadi peluang bahwa kebutuhan Australia atas Indonesia semakin besar karena Indonesia berposisi sebagai gerbang jalur perdagangan. Setelah munculnya kecenderungan tersebut, ketika ada tawaran kerjasama dengan Victoria maka pemerintah D.I. Yogyakarta menindaklanjuti dengan baik.

Karena adanya alasan geopolitik tersebut yang merupakan kesempatan untuk menjalin kerjasama tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah D.I. Yogyakarta. Walaupun diatas kertas kita terlihat lebih rendah dalam bidang ekonomi dari pada Victoria yang punya anggaran lebih besar namun karena alasan Geopolitik yang mana Victoria sedang membutuhkan akses untuk dapat terjun ke pasar pasifik dengan mudah maka hal tersebut dimanfaatkan oleh D.I. Yogyakarta untuk semakin mempererat hubungan kerjasama keduanya. Walaupun, hubungan antar masyarakat sudah terjalin dengan baik jauh sebelum terbentuknya kerjasama *sister province*. (Albana, 2018)

Walaupun keinginan D.I. Yogyakarta sebetulnya adalah kerjasama dibidang ekonomi, namun apabila D.I. Yogyakarta menjalin kerjasama dibidang selain ekonomi pun – dalam hal ini adalah bidang pendidikan, industri kreatif, dan budaya – D.I. Yogyakarta tetap mendapatkan manfaat yang besar, khususnya manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Adanya pengalaman dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat menjadi bekal motivasi dalam diri individu sebagai modal untuk terjun ke dunia Internasional.

Adanya faktor pertimbangan geopolitik, adanya faktor ekonomi, serta adanya beberapa kemiripan tersebut diharapkan dapat saling tukar ilmu pengetahuan (Albana, 2018). Karena, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa banyak sekali musisi, universitas, dan destinasi wisata yang diharapkan dapat membantu perekonomian D.I. Yogyakarta seperti halnya Victoria yang pendapatan ekonominya sebagian besar berasal dari sektor jasa. Selain itu, kerjasama dalam bidnag, pendidikan, seni budayan, dan industri kreatif dapat saling bertukar ilmu pengetahuan. Hal yang terpenting yang dimiliki D.I. Yogyakarta yaitu potensi bisnis yang tinggi sehingga adanya industri kreatif ini apabila diberi perhatian khusus maka akan dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta. Disini peran Victoria sangat dibutuhkan karena Victoria mendapatkan predikat sebagai daerah terbaik untuk melakukan bisnis di Australia yang diberikan oleh *Business Council of Australia* pada tahun 2010.

Meskipun, kerugian sangat jelas karena D.I. Yogyakarta tidak dapat menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Victoria. Namun, D.I. Yogyakarta sadar bahwa dalam prosesn pencapaian kepentingan itu bertahap, apabila dikedepannya kita bisa mendapatkan 100% keuntungan maka tidaklah salah jika saat ini kita mengambil dulu 70% dari keuntungan tersebut daripada kita sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, apabila hubungan keduanya semakin membaik tentunya tidak menuput kemungkinan akan adanya kerjasama-kerjasama dibidang lainnya. D.I. Yogyakarta berharap dengan adanya kerjasama yang terjalin ini akan memberikan efek baik ke perekonomian, perdagangan, dan investasi kedua Negara. (Albana, 2018)

Potensi Victoria dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan industri kreatif yang diharapkan sebagai pembuka jalan terhadap potensi kerjasama dibidang selanjutnya tersebut tentunya menjadi rasionalisasi mengapa D.I. Yogyakarta memutuskan untuk menjalin kerjasama *sister province* dengan Victoria. D.I. Yogyakarta sebagai daerah dengan potensi pendidikan dan kebudayaan dapat mempelajari bagaimana Victoria mengelola bidnag-bidang tersebut.

C. Penutup

Kerjasama D.I. Yogyakarta dengan Negara bagian Victoria dapat dikategorikan sebagai hubungan internasional antar aktor Negara dengan ruang lingkup antar provinsi dan Negara bagian yang mempunyai beberapa kesamaan dan tujuan maka hubungan kerjasama tersebut dinamakan dengan kerjasama kota kembar atau *sister province* dalam hal ini karena yang bekerja sama yaitu provinsi. Penandatanganan MoU *sister province* yang terjadi antara D.I. Yogyakarta dengan Victoria pada tanggal 3 Mei 2017 oleh pimpinan kedua gubernur.

Landasaan peraturan mengenai pembentukan kerjasama *sister city* maupun *sister province* di Indonesia termuat dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 200 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri

Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

D.I. Yogyakarta banyak menjalin kerjasama-kerjasama, baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama Internasional. Salah satu kerjasama Internasional yang dijalin oleh pemerintah D.I. Yogyakarta yaitu kerjasama *sister province*. Awal mula munculnya kerjasama *sister province* dikarenakan adanya kedekatan antar pemimpin D.I. Yogyakarta dengan prefektur Kyoto. Adanya kedekatan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membentuk kerjasama. Selain prefektur Kyoto, kemudian muncul kerjasama-kerjasama lainnya yaitu kerjasama *sister province* D.I. Yogyakarta dengan provinsi Ismailia Republik Arab Mesir, kerjasama dengan Gyeongsangbuk-Do Korea Selatan, kerjasama dengan Negara Bagian California, kerjasama dengan provinsi Tyrol Republik Austria, kerjasama dengan chungcheongnam-Do Korea Selatan, serta kerjasama dengan Gangwon-Korea Selatan. Dengan adanya kerjasama-kerjasama tersebut kemudian D.I. Yogyakarta membuka mitra kerjasama lebih luas lagi, salah satunya yaitu kerjasama dengan Negara bagian Victoria, Australia.

Inisiasi awal pembentukan kerjasama *sister province* D.I. Yogyakarta dengan Victoria yaitu adanya kunjungan dari *premier* Victoria Mr. Denis Naptine beserta 450 delegasi pengusaha UKM di Victoria yang berkunjung ke Yogyakarta dalam rangka penjajakan peluang bisnis. Kemudian terdapat pembicaraan antar pemimpin dan kemudian muncul wacana kerjasama. Adanya tawaran kerjasama ini disambut positif oleh D.I. Yogyakarta dan kemudian dilakukan penjajakan potensi antar kedua belah pihak untuk selanjutnya dilaksanakan penandatanganan LoI pada tanggal 30 September 2015, setelah ditandatanganinya LoI dan mendapat persetujuan dari DPRD kemudian dilakukan pembahasan dengan instansi terkait, setelah itu diajukan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Didalam proses yang panjang tersebut tentunya D.I. Yogyakarta tetap menjaga komunikasi dengan Victoria agar keduanya mendapatkan manfaat yang diinginkan.

Dalam proses perwujudan kerjasama tersebut tidak luput dari beberapa hambatan, yaitu adanya keterbatasan anggaran masing-masing Negara, adanya keterbatasan waktu dan jarak, serta kurangnya koordinasi antara instansi yang seharusnya melaksanakan setiap bidang dalam kerjasama tersebut. Namun, hal tersebut bukan menjadi masalah besar karena kerjasama tetap terwujud.

Terwujudnya kerjasama *sister province* antara D.I. Yogyakarta dengan Victoria tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan adanya kriteria kesamaan antar kedua kota. Antara lain yaitu: D.I. Yogyakarta dan Victoria merupakan daerah yang kaya seni dan Budaya, D.I. Yogyakarta dan Victoria merupakan daerah wisata, D.I. Yogyakarta dan Victoria merupakan daerah pendidikan, D.I. Yogyakarta dan Victoria merupakan daerah yang tepat untuk memulai bisnis yang dalam hal ini termasuk dalam kesamaan karakteristik antar keduanya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi terbentuknya kerjasama *sister province* ini yaitu adanya pertimbangan geopolitik dan ekonomi serta beberapa keuntungan yang didapatkan apabila D.I. Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Victoria meskipun bukan dalam bidang ekonomi antara lain yaitu keuntungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat merasakan secara langsung pertukaran ilmu pengetahuan tersebut dengan adanya program pelatihan musisi-musisi D.I. Yogyakarta dengan MSO contohnya. Selain itu, keuntungan yang belum mencapai 100% ini dianggap sebagai pembuka jalan untuk mendapatnya keuntungan yang maksimal tersebut. Karena, dalam pencapaian kepentingan melalui tahapan-tahapan. Dengan adanya kerjasama di bidang pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif dapat menjaga hubungan baik antar keduanya sehingga tidak menutup kemungkinan untuk muncul kerjasama-kerjasama dibidang lainnya.

Kerjasama *sister province* yang dijalin antara D.I. Yogyakarta dengan Victoria dapat dikatakan sebagai sebuah kerjasama yang lumayan sukses dibandingkan dengan kerjasama-kerjasama lainnya karena Victoria kerjasama dengan Victoria ini memiliki *action plan* yang jelas dan selalu aktif setiap tahunnya dan merupakan salah satu yang paling aktif dari kerjasama lainnya (Albana, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. (2016). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mukti, T. A. (2013). *PARADIPLOMACY; Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.

Jurnal

- Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY. (2006). Bunga Rampai: Kerjasama Luar Negeri Propinsi DIY. 25-26.

Wawancara

- Albana, M. H. (2018, Februari 21). Kerjasama sister province DIY - Victoria. (Z. A. Renggani, Interviewer)

Dokumen Pemerintah

- BKPM. (2017). Dokumen Kerjasama DIY - Victoria. Yogyakarta.
- Pemda DIY. (2011). *Laporan Pertanggung jawaban Gubernur DIY*. Yogyakarta: Pemda DIY.

Sumber internet

- Kementrian Luar Negeri. (n.d.). *Bilateral Indonesia - Victoria*. Retrieved April 4, 2018, from CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA:
<https://www.kemlu.go.id/melbourne/lc/Pages/Australia1.aspx>
- Parliament of Victoria. (2010, Mei 12). *Parliamentary System*. Retrieved April 4, 2018, from Parliament of Victoria:
<https://www.parliament.vic.gov.au/about/the-parliamentary-system>
- Parliament of Victoria. (2017, Maret 6). *Premier of Victoria*. Retrieved April 4, 2018, from Parliament of Victoria:
<https://www.parliament.vic.gov.au/about/people-in-parliament/premier-of-victoria>
- Tim Ekonomi dan Keuangan BI. (2016, Mei 18). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Tw I 2016*. Retrieved Februari 17, 2018, from Bank Indonesia:
<http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/yogyakarta/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Keuangan-Daerah-Tw-I-2016.aspx>